

Media Online	Tribun Timur
Tanggal	Jumat, 23 Mei 2025
Wilayah	Kabupaten Gowa



Bukan Cuma DBH, Pemprov Sulsel Utang Dana Sharing BPJS Rp21,8 M ke Pemkab Gowa

TRIBUN-GOWA.COM - Selain Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Provinsi (Pemprov), Sulawesi Selatan (Sulsel) belum membayarkan dana sharing untuk alokasi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahun 2024 ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa. Nilai dana sharing BPJS tahun 2024 belum terbayarkan mencapai Rp 21,8 Miliar. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa, Mahmud saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025) "Dana sharing BPJS tahun 2024 belum ada yang terbayar. Kalau dana sharing kurang lebih Rp 21,8 Miliar untuk tahun 2024," sebut Mahmud. Mahmud mengaku pihaknya telah berkoordinasi ihwal dana sharing, belum terbayarkan ke Pemprov Sulsel. Bahkan, pihaknya juga telah menyampaikan hal tersebut ke badan anggaran (Banggar) DPRD Sulsel "Selalu kita komunikasikan bahkan dengan Banggar DPRD Sulsel," ucapnya Dia menambahkan, dana sharing BPJS 2024 tertunggak berimbas penonaktifan peserta BPJS yang menjadi tanggungan Pemprov Sulsel Hal tersebut juga telah disampaikan saat Banggar DPRD Sulsel kunjungan kerja ke Kantor Bupati Gowa pada Rabu (21/5/2025)

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka monitoring realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa hingga pembayaran dana sharing PBI BPJS dari Pemprov Sulsel. Dalam pemaparannya, Kepala BPKA Kabupaten Gowa, Mahmud, menjelaskan APBD Kabupaten Gowa tahun 2024 mencapai angka Rp 2 triliun. Pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 2,043 triliun dan naik menjadi Rp 2,103 triliun setelah perubahan. Sementara itu, belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp 2,043 triliun naik menjadi Rp 2,228 triliun setelah perubahan, dengan tingkat realisasi mencapai 98 persen. "Salah satu kendala utama yang dihadapi Pemkab Gowa adalah belum cairnya dana sharing dari Pemerintah Provinsi Sulsel untuk alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahun 2024 yang telah tertunda selama satu tahun," ucapnya

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin mengaku tahun 2025 ini pihaknya akan bersiap dengan segala kondisi yang ada. Menurutnya, dana sharing PBI BPJS yang belum terbayarkan oleh Pemprov di tahun 2024 tersebut akan menjadi pembelajaran untuk bersiap menghadapi kondisi terburuk. "Insya Allah APBD kita kokoh di tahun depan dan menyiapkan kondisi jika penundaan dana sharing masih dilakukan. Kita harus sepeham masyarakat di 24 kabupaten/kota adalah juga masyarakat Gubernur, terutama dalam sektor kesehatan," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan, Pemkab Gowa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk membackup kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat yang belum tercover oleh BPJS. "Pemkab Gowa sangat konsen terhadap pelayanan kesehatan sehingga meskipun kami telah mengalokasikan anggaran tambahan, kami juga harap DPRD bisa memnjembatani agar dana sharing ini bisa segera terbayarkan," tambahnya. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Banggar DPRD Sulsel telah hadir dan memberikan perhatian terhadap permasalahan daerah, terutama terkait alokasi dana kesehatan Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Banggar DPRD Sulsel, Asman mengaku permasalahan ini turut menjadi sorotan. Ia mengaku hampir semua daerah mengalami penundaan pembayaran dana sharing BPJS, termasuk Gowa."Ini menjadi perhatian serius kami di DPRD Sulsel karena menyangkut tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik. Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penghentian sementara dana sharing BPJS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.Ia berharap agar Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan dasar di kabupaten/kota, khususnya di Gowa.